



Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Internal Control sebagai Variabel Moderasi (*The Influence of Transparency and Accountability on Village Fund Management with Internal Control as a Moderating Variabel*)

Intan T. Mohamad¹, Usman², Mulyani Mahmud³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

intanmohamad522@gmail.com¹, usmanpattiwi@gmail.com², mulyanm@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received: 27 Juli 2026

Revised: 10 Agustus 2026

Accepted: 26 Agustus 2026

Keywords:

Transparency

Accountability

Village Fund Management

Internal Control

Kata Kunci:

Transparansi

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

Internal Control

Abstract

This study aims to analyze the influence of transparency and accountability on village fund management and to examine the role of internal control as a moderating variable in village governments in Tabongo District, Gorontalo Regency. This study employed a quantitative approach with a causal associative research design. The population consisted of 110 village government officials from nine villages in Tabongo District, while 36 respondents were selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with IBM SPSS Statistics version 26. The results indicate that transparency and accountability have a positive and significant effect on village fund management. Furthermore, internal control moderates the effect of transparency on village fund management and is classified as pure moderation, although the moderating effect weakens the relationship. Meanwhile, internal control does not moderate the effect of accountability on village fund management and is therefore classified as homologiser moderation. These findings indicate that improving the quality of village fund management is influenced by the implementation of transparency and accountability, while the effectiveness of internal control only plays a role in the relationship between transparency and village fund management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta menguji peran *internal control* sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 110 aparatur pemerintah desa pada sembilan desa di Kecamatan Tabongo, sedangkan sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 36 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda serta *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, *internal control* mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan tipe *pure moderation*, namun arah moderasi yang dihasilkan bersifat memperlemah. Sementara itu, *internal control* tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa sehingga termasuk tipe *homologiser moderation*. Temuan

penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh penerapan transparansi dan akuntabilitas, sedangkan efektivitas *internal control* hanya berperan dalam hubungan antara transparansi dan pengelolaan keuangan dana desa.

Corresponding Author:

Intan T. Mohamad
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo
intanmohamad522@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri (Soamole, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Goo & Sanda, 2022). Pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siti Munawaroh, 2025; Sulistyowati et al., 2024).

Besarnya alokasi dana desa semakin menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Pada tahun 2025, Kabupaten Gorontalo menerima dana desa sebesar Rp160,53 miliar yang dialokasikan kepada 191 desa di 19 kecamatan, termasuk Kecamatan Tabongo yang terdiri atas sembilan desa. Beberapa desa di Kecamatan Tabongo menerima dana desa lebih dari Rp1 miliar. Besarnya dana tersebut menuntut pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun, besarnya alokasi dana desa tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan yang optimal. Berdasarkan observasi awal pada sembilan desa di Kecamatan Tabongo, masih ditemukan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, belum tersedianya laporan realisasi anggaran secara lengkap dan mudah diakses, keterlambatan penyampaian laporan, serta belum tertibnya dokumentasi administrasi keuangan. Selain itu, hanya Desa Moahudu dan Desa Tabongo Timur yang telah menyediakan informasi APBDes dan laporan realisasi anggaran secara terbuka dan diperbarui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Oci et al., 2023).

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui pelaporan yang tepat waktu, kepatuhan terhadap prosedur, serta dokumentasi administrasi yang memadai. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan penggunaan dana desa secara tepat waktu dan sesuai prosedur (Jelahu et al., 2024). Penerapan akuntabilitas yang baik dapat mendukung kualitas pengelolaan keuangan karena penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrative (Ramadani et al., 2024).

Selain transparansi dan akuntabilitas, *internal control* menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sistem pengendalian internal berfungsi memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai prosedur serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pada beberapa desa di Kecamatan Tabongo masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Suryani dan Hidayat (2023) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa serta *internal control* mampu memoderasi pengaruh transparansi. Adrianti et al. (2023) juga menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, tetapi *internal control* hanya mampu memoderasi pengaruh transparansi. Suciana et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan hasil

tersebut menunjukkan adanya *research gap* mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas serta peran *internal control* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan fenomena empiris dan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian *internal control* sebagai variabel moderasi pada hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dalam konteks pemerintah desa di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta menguji peran *internal control* dalam memoderasi kedua hubungan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan dianalisis secara statistik, sedangkan penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab-akibat antarvariabel (Sugiyono, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta menguji peran *internal control* sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Penelitian dilaksanakan pada desa-desa yang berada di Kecamatan Tabongo, dengan waktu penelitian dimulai pada Februari hingga selesai.

Variabel dalam penelitian terdiri atas transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) sebagai variabel independen, pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebagai variabel dependen, serta *internal control* (Z) sebagai variabel moderasi. Transparansi diukur melalui penyediaan informasi, aksesibilitas informasi, keterbukaan dokumen, keterbukaan proses, dan mekanisme pengaduan. Akuntabilitas diukur melalui pertanggungjawaban pelaporan, kepatuhan prosedur, ketepatan waktu laporan, dan pengarsipan bukti transaksi. Pengelolaan keuangan dana desa diukur melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, *internal control* diukur melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert.

Populasi penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Tabongo terdiri atas sembilan desa dengan jumlah keseluruhan aparatur pemerintah desa sebanyak 110 orang. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dana desa, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan atau pelaporan keuangan desa, memahami proses pengelolaan keuangan dana desa, serta bersedia menjadi responden. Berdasarkan kriteria tersebut, responden terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur perencanaan dari masing-masing desa. Dengan demikian, diperoleh sampel sebanyak 36 responden yang berasal dari sembilan desa dengan masing-masing empat responden.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan mengenai transparansi, akuntabilitas, *internal control*, dan pengelolaan keuangan dana desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, seperti data alokasi dana desa, struktur pemerintahan desa, dokumentasi publikasi APBDes, jurnal, serta sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel dan terlebih dahulu diuji untuk memastikan kualitas pengukuran. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson dengan tingkat signifikansi 0,05. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seluruh pengujian instrumen dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan SPSS versi 26. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Multikolinearitas diuji melalui nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), sedangkan heteroskedastisitas diuji menggunakan uji Glejser.

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya, MRA digunakan untuk mengetahui kemampuan *internal*

control dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji *t*), sedangkan pengaruh moderasi ditentukan berdasarkan signifikansi variabel interaksi antara variabel independen dan *internal control*. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh atau moderasi yang signifikan. Arah koefisien interaksi digunakan untuk menentukan apakah *internal control* memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 36 responden yang terdiri atas aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), diperoleh bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, *internal control* berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa, namun tidak mampu memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model penelitian telah memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan dalam analisis regresi. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,139 ($>0,05$), sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sedangkan uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, bebas dari gejala multikolinearitas, dan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,336 dengan arah pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dana desa. Variabel akuntabilitas juga memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,968, yang menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Pada pengujian moderasi, variabel interaksi transparansi dan *internal control* (*X1Z*) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ sehingga *internal control* mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sementara itu, variabel interaksi akuntabilitas dan *internal control* (*X2Z*) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,115 > 0,05$ sehingga *internal control* tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, keberadaan *internal control* memberikan peran yang berbeda pada setiap hubungan yang diuji. *Internal control* mampu memoderasi hubungan transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan tipe *pure moderation*, namun tidak mampu memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa sehingga termasuk tipe *homologiser moderation*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal lebih berperan dalam mendukung efektivitas penerapan transparansi dibandingkan dalam memperkuat hubungan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dana desa. Transparansi dalam penelitian ini diukur melalui indikator penyediaan informasi, aksesibilitas informasi, keterbukaan dokumen, keterbukaan proses, dan mekanisme pengaduan. Indikator-indikator tersebut menggambarkan sejauh mana pemerintah desa memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan transparansi yang baik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui setiap tahapan pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Keterbukaan informasi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kondisi empiris di Kecamatan Tabongo. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa desa yang belum menyediakan informasi APBDes dan laporan realisasi anggaran secara lengkap serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran juga belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek penyediaan informasi, aksesibilitas informasi, dan keterbukaan dokumen agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai *principal*. Transparansi menjadi salah satu mekanisme yang mampu mengurangi *information asymmetry* antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin terbuka informasi yang disampaikan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Muhammad (2023), Munawaroh et al. (2024), Usman et al. (2022), dan Latif et al. (2026), yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Keterbukaan informasi yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, memperkuat pengawasan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi empiris di Kecamatan Tabongo, teori yang digunakan, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana desa sehingga pemerintah desa perlu terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif, akuntabel, dan terpercaya.

3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dana desa. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui indikator pertanggungjawaban pelaporan, kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan pengarsipan bukti transaksi. Keempat indikator tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa karena setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan kondisi empiris di Kecamatan Tabongo. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas, seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan belum optimalnya dokumentasi administrasi keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar seluruh proses pengelolaan keuangan dana desa dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan, kepatuhan terhadap prosedur, serta kelengkapan administrasi menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan keuangan dana desa yang lebih baik.

Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai *principal*. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyampaian laporan yang transparan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan administrasi yang baik sehingga mampu mengurangi *information asymmetry* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siti Munawaroh (2025), Usman et al. (2022), dan Abdilah et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan dana desa yang dihasilkan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3 Internal Control dalam Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *internal control* mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan termasuk dalam tipe pure moderation. Hal ini menunjukkan bahwa *internal control* tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengelolaan keuangan dana desa, tetapi mampu berinteraksi secara signifikan dengan variabel transparansi. Namun demikian, arah moderasi yang dihasilkan bersifat memperlemah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ketika sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik, pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa menjadi tidak terlalu dominan karena telah didukung oleh mekanisme pengawasan dan pengendalian yang berjalan dalam organisasi pemerintah desa.

Temuan tersebut sejalan dengan kondisi empiris di Kecamatan Tabongo. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa desa yang belum sepenuhnya menyediakan informasi APBDes dan laporan realisasi anggaran secara lengkap serta mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menerapkan berbagai bentuk pengendalian, seperti pembagian tugas aparatur desa, pelaksanaan prosedur administrasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran *internal control* dalam penelitian ini tercermin melalui penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan sesuai prosedur, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Namun demikian, arah moderasi yang memperlemah menunjukkan bahwa ketika sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif, kualitas pengelolaan keuangan desa tidak lagi hanya ditentukan oleh tingkat transparansi, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian yang telah diterapkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, transparansi tetap menjadi faktor penting, tetapi pengaruhnya menjadi relatif lebih kecil karena telah didukung oleh fungsi pengendalian internal yang memadai.

Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban mengelola dana desa secara bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal*. Dalam hubungan tersebut, sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi *information asymmetry* melalui pengendalian, evaluasi, dan pemantauan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Adrianti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi hubungan antara transparansi dan pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa arah moderasi yang dihasilkan bersifat memperlemah, sehingga peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh transparansi, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa.

3.4 Internal Control dalam Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *internal control* tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa sehingga termasuk dalam tipe homologiser moderation. Hal ini menunjukkan bahwa *internal control* tidak berinteraksi secara signifikan dengan akuntabilitas dalam memengaruhi pengelolaan keuangan dana desa. Dengan demikian, keberadaan sistem pengendalian internal belum mampu memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan akuntabilitas aparatur desa dibandingkan dengan keberadaan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kondisi empiris di Kecamatan Tabongo. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas, seperti keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan belum optimalnya dokumentasi administrasi keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, pelaksanaan akuntabilitas masih memerlukan komitmen, integritas, serta kepatuhan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan dana desa tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem pengendalian internal, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu,

kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, tetapi juga oleh komitmen aparatur desa dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa *internal control* dalam penelitian ini tidak mampu memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai *agent* memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai *principal*. Pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga keberadaan sistem pengendalian internal tidak secara otomatis memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana desa. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Adrianti et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dana desa lebih ditentukan oleh konsistensi penerapan akuntabilitas, kepatuhan terhadap prosedur, dan tanggung jawab aparatur desa dibandingkan dengan keberadaan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- 1) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip transparansi dalam penyediaan informasi dan keterbukaan pengelolaan dana desa, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dana desa.
- 2) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Semakin baik pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan dana desa.
- 3) *Internal control* mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan termasuk dalam tipe *pure moderation*. Namun, arah moderasi yang dihasilkan bersifat memperlemah, sehingga sistem pengendalian internal tidak memperkuat, melainkan memperlemah hubungan antara transparansi dan pengelolaan keuangan dana desa.
- 4) *Internal control* tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa sehingga termasuk dalam tipe *homologiser moderation*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum mampu memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

4.2 Saran/Rekomendasi

- 1) Pemerintah desa di Kecamatan Tabongo diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa melalui penyediaan informasi yang lengkap, mudah diakses, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
- 2) Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem *internal control* melalui penguatan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pengelolaan keuangan dana desa, seperti kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, atau komitmen organisasi, serta memperluas lokasi penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abdilah, S. Y., Yusuf, N., & Taruh, V. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 72-86.
- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di Kabupaten Gowa. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(1), 33-44.

- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Jelahu, A. H., Sopanah, A., & Zainudin, Z. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 5(1), 55-64.
- Latif, N. W., Boki, Z., & Mahmud, M. (2026). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Economic Resource*, 9(1), 557-568.
- Munawaroh, M., Herawaty, N., & Yustien, J. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 6525-6541.
- Munawaroh, S., Ganie, D., & Purwanto, S. A. (2025). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kampung Labanan Makmur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau). *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 8(1), 60-69.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443-456.
- Ramadani, R., Erfina, E., & Ikb, M. (2024). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(2), 334-345.
- Soamole, N. N. (2024). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi.
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997-1008.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866-873.
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 228-247.
- Usman, U., Mahfiza, M., & Lamusi, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo. *Al-Buhuts*, 18(2), 517-528.